

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliore Kab. Rembang

Baihaki¹ Yuwanto² Supratiwi³
Departemen Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pengembangan, Desa wisata

* Korespondensi Penyusun: ilyasbaihaki001@gmail.com

ABSTRACT

Poverty in Indonesia remains a serious issue, including in Rembang Regency, which in 2023 recorded a poverty rate of 14.17% or around 91.90 thousand people. Efforts to empower the community continue to be made, one of which is through empowerment programs at the village level by developing local potential, such as tourism villages. The aim of this study is to analyze the empowerment carried out by the local government towards the community of Tasikharjo Village through the development of village tourism potential and to identify the supporting and hindering factors faced by the people of Tasikharjo Village, as well as to identify the impact of village tourism development. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. The research informants include the village head, head of tourism destination division, tourism managers, local residents, and tourists. The results of the study show that community empowerment through the development of the Tasikharjo Tourism Village has been successful, as seen in the development of infrastructure and the ongoing sustainability of tourism. Supporting factors for empowerment include support from the village government, active participation from the community, and the potential that exists. Hindering factors include limited funding for infrastructure development and coordination management between managers and vendors in applying standard sales prices. The positive impact can be seen in the improvement of the local economy and social welfare. Economically, new business opportunities such as food stalls and toy shops have opened, reducing the unemployment rate by 0.15 percent. The empowerment program has succeeded in increasing the income of the Tasikharjo tourism village community to be equivalent to the Regional Minimum Wage (UMR) of Rp. 2,099,000, in Rembang Regency. Social impacts are also evident, with the community's education level increasing as more people are encouraged to pursue higher education. However, environmental impacts have emerged, such as increasing waste accumulation and pollution caused by waste management through burning, which contributes to local air and environmental pollution. The findings indicate that in the development of the village's tourism potential, the Tasikharjo Village Government has not yet been able to do it independently and still requires funding assistance from external parties such as the local government, educational institutions, and financial institutions like Bank BRI. It is recommended to provide training on financial management, tourism services, and waste management to ensure the sustainability of the Tasikharjo Tourism Village development.

Keywords: Empowerment, Community, Development, Tourism Village

A. Pendahuluan

Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa terus menghadapi masalah kemiskinan, termasuk di Kabupaten Rembang yang mencatat 14,17% penduduk miskin pada tahun 2023. Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini termasuk pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup melalui pemanfaatan potensi lokal, seperti pariwisata.

Desa Tasikharjo, dengan potensi alam seperti pantai pasir putih, memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata

berbasis masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata secara langsung, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata tersebut.

Pengembangan desa wisata ini memberikan dampak positif, termasuk penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan pengurangan angka pengangguran. Namun, tantangan seperti keterbatasan pendanaan dan kurangnya koordinasi manajemen masih menjadi hambatan dalam pengelolaan wisata secara

optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, termasuk dalam hal manajemen, pemasaran, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Rembang.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dengan lokasi penelitian Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliorejo, Kabupaten Rembang merupakan desa yang dilaksanakan pemberdayaan sehingga menjadi desa wisata unggulan. Subjek penelitian di tentukan dengan purposive sampling, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi.

C. Kajian Pustaka

a) Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan martabat kelompok yang terjebak dalam kemiskinan melalui partisipasi dan otonomi pengambilan keputusan. Friedman menekankan pentingnya politik dalam pemberdayaan, sedangkan Chambers melihat pemberdayaan sebagai konsep ekonomi yang berpusat pada masyarakat

dan berkelanjutan. Hadiwijoyo menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kemampuan kelompok rentan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Pemberdayaan mencakup tiga elemen penting: menciptakan iklim yang mendukung pengembangan potensi (enabling), memperkuat daya masyarakat (empowering), dan melindungi mereka yang lemah dari ketidakadilan (protecting).

b) Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus global, terutama di abad ke-21, baik di negara maju maupun berkembang. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dengan fokus pada tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori-teori pembangunan berkelanjutan mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pendapatan, keseimbangan antar sektor, serta peningkatan kualitas manusia dan lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan berkelanjutan harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Aspek-aspek ini meliputi:

Ekonomi Kesejahteraan: Pertumbuhan ekonomi yang adil, didukung oleh teknologi ramah lingkungan.

Keadilan Sosial: Kesetaraan akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

Lingkungan Hidup: Pemantauan indikator lingkungan seperti kualitas udara,

keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi terbarukan.

Pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Tasikharjo

Pemberdayaan adalah proses manajemen yang tidak hanya berfokus pada peningkatan aset, tetapi juga melibatkan pengelolaan lingkungan sekitar untuk mencapai keberhasilan. Desa Wisata Tasikharjo merupakan contoh pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi wilayah pesisirnya sejak tahun 2000-an. Sebelum menjadi destinasi wisata, wilayah ini digunakan sebagai lahan pakan ternak dan kandang, dan upaya penanaman pohon sebelumnya gagal.

Pada tahun 2016, kerjasama antara pemerintah desa, Dinas Kelautan, dan Dinas Pariwisata dimulai, yang melibatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pariwisata. Melalui pengembangan Pantai Pasir Putih, hutan cemara, dan Pulau Gede, pemberdayaan ini memberikan manfaat ekonomi bagi warga, khususnya melalui UMKM. Keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, pengelola kolam renang merasakan peningkatan pendapatan dari wisatawan, terutama pada akhir pekan.

Enabling

Proses pemberdayaan di Desa Tasikharjo mengikuti konsep enabling menurut Hadiwijoyo, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal, seperti pantai pasir putih dan hutan cemara. Kesadaran akan potensi wisata tumbuh dari inisiatif kelompok pemuda yang melakukan survei ke daerah lain dan mengelola pohon cemara di

sekitar pantai. Pemberdayaan juga melibatkan pelatihan manajemen pariwisata yang diikuti oleh 200 peserta pada tahun 2019, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Selain itu, infrastruktur penting seperti tempat parkir, toilet, dan pusat informasi dibangun dengan partisipasi masyarakat dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan bank melalui program CSR. Kerjasama ini mempercepat pembangunan dan meningkatkan kenyamanan wisatawan, menjadikan Desa Tasikharjo sebagai destinasi yang berkembang. Langkah-langkah ini telah memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat dan menunjukkan keberhasilan pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Empowerment

Pemberdayaan di Desa Wisata Tasikharjo dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada tahun 2016, untuk meningkatkan kesadaran akan potensi wisata desa. Inisiatif kelompok pemuda, seperti pesta makan ikan gratis, memperkenalkan wisata

pantai dan mengaktifkan kelompok pengelola wisata (pokdarwis). Keterlibatan masyarakat meningkat dari 25% menjadi 90%, menciptakan peluang ekonomi melalui pendirian warung dan pekerjaan di sektor pariwisata. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa melalui musyawarah pembangunan.

Desa Wisata Tasikharjo berkembang secara mandiri, mengalokasikan 70% pendapatan untuk pengembangan wisata dan sisanya dibagikan kepada masyarakat yang terlibat. Inovasi dan pembaruan spot wisata dilakukan rutin untuk menjaga daya tarik wisatawan. Dengan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah dan swadaya, desa wisata ini terus memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan wisata yang lebih baik melalui partisipasi aktif masyarakat.

Protecting

Bentuk akhir dari pemberdayaan, menurut Hadiwijoyo, adalah perlindungan terhadap aset hasil pemberdayaan. Di Desa Tasikharjo, perlindungan ini penting mengingat kepemilikan wisata pantai pasir putih oleh masyarakat desa, yang harus dijaga dari intervensi pihak luar. Pada tahun 2018, upaya investor untuk mengelola wisata ini menimbulkan konflik, namun masyarakat menolak dengan dukungan pemerintah desa. Kebijakan pemerintah Desa Tasikharjo membatasi keterlibatan masyarakat dari desa lain dalam pariwisata, memastikan manfaat ekonomi dinikmati oleh warga setempat. Regulasinya meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga reputasi desa, dan mendorong pengelolaan aset yang berkelanjutan, meskipun juga menghadapi tantangan terkait peluang bagi

pihak luar. Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan ini menunjukkan keberhasilan, dengan peningkatan partisipasi masyarakat, meski masih memerlukan dukungan pendanaan dari luar. Perlindungan aset dan regulasi lokal menjadi fokus utama untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dengan harapan agar Desa Tasikharjo terus berkembang sebagai destinasi wisata yang memberikan manfaat signifikan bagi komunitas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Tasikharjo

Faktor Pendukung

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada desa wisata tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung pemberdayaan masyarakat desa wisata Tasikharjo yaitu sebagai berikut

a. Peran pemerintah dan pihak terkait

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga peran penting pemerintah dan pihak lain untuk keberhasilan desa wisata Tasikharjo. Pemerintah daerah Kabupaten Rembang, melalui Dinas Kelautan dan Dinas Pariwisata, terlibat dalam pengembangan wisata setelah menerima proposal dari desa. Pada tahun 2019, pemerintah desa mengeluarkan SK tentang Pembentukan Desa Wisata Tasikharjo, yang mendorong pelatihan manajemen wisata oleh Dinas Pariwisata. Dukungan juga datang dalam bentuk promosi bulanan di media sosial dan pencarian agen travel untuk meningkatkan kunjungan. Selain itu, pemerintah pusat memberikan anggaran untuk

fasilitas pariwisata, sedangkan pemerintah desa mendukung pembukaan pariwisata dan melakukan perbaikan infrastruktur. Kerjasama dengan CSR dari Pertamina, Bank BRI, dan Universitas Diponegoro juga membantu pengembangan wisata, seperti penanaman mangrove dan pemasangan informasi biota laut. Keseluruhan dukungan dari berbagai pihak menciptakan sinergi yang signifikan dalam pengembangan dan keberlanjutan desa wisata Tasikharjo.

b. Partisipasi aktif masyarakat

Keterlibatan masyarakat di desa wisata Tasikharjo sangat baik, terutama di kalangan pemuda yang aktif mengeksplorasi potensi wisata. Mereka melakukan survei ke pantai lain untuk mencari referensi dan turut mengelola pohon cemara yang ditanam oleh Kementerian Kelautan, yang berkontribusi pada meningkatnya minat pengunjung. Selain itu, masyarakat juga mempromosikan wisata mereka melalui berbagai perlombaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Menurut Khoirul Jovid, pengelola pantai, setelah memenangkan lomba tingkat nasional, desa wisata mereka mulai dikenal, dan masyarakat aktif berbagi pengalaman dalam pengelolaan pariwisata. Semangat masyarakat untuk berkembang di sektor pariwisata ini memotivasi pemerintah desa dan kabupaten untuk terus melakukan pemberdayaan, dengan keyakinan bahwa desa wisata Tasikharjo akan terus berkembang.

c. Potensi wisata

Potensi wisata merupakan faktor

kunci dalam pengembangan pariwisata, dan pantai pasir putih Desa Tasikharjo memiliki keindahan yang menjadikannya objek wisata menarik. Keberadaan ribuan pohon cemara di pantai menawarkan spot foto yang menarik, sementara pulau Gede di dekatnya juga menjadi daya tarik. Dimas Adi Sanjaya, seorang pengunjung, menyatakan bahwa pantai ini adalah yang terbaik di Kabupaten Rembang. Dengan pengembangan pelayanan dan fasilitas, serta adanya spot foto dan kolam renang, Tasikharjo memiliki potensi yang menjanjikan. Selain itu, informasi tentang biota laut dapat digunakan untuk kegiatan belajar, dan banyaknya warung menyediakan kenyamanan bagi pengunjung.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Tasikharjo adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun sarana-prasarana. Pada awalnya, sumber daya manusia masih rendah dan cenderung egois, sehingga masyarakat kesulitan memahami dan menerima pengetahuan baru selama pelatihan. Naslihan Effendi, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, menyebutkan bahwa diperlukan konsultasi langsung melalui WhatsApp untuk mendukung pemahaman masyarakat. Selain itu, penolakan terhadap pemanfaatan potensi alam dan kesulitan menerima kritik dari pengelola juga menjadi tantangan. Keterbatasan anggaran mempengaruhi pengembangan wisata, di mana pendapatan dari pantai tidak cukup untuk menutupi biaya pembangunan fasilitas seperti

toilet dan spot foto. Pemerintah desa sering mengajukan dana kepada DPR dan bekerja sama dengan mitra perusahaan untuk meningkatkan fasilitas. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan, yang berdampak pada pendapatan dan pembangunan wisata.

b. Tantangan infrastuktur

Infrastruktur adalah komponen penting dalam akses menuju wisata, namun Desa Tasikharjo masih mengalami keterbatasan. Pelebaran jalan menuju wisata menjadi hambatan utama, dengan pembebasan lahan dari masyarakat yang sulit dan sering ditolak. Meskipun terdapat rencana masterplan tahun 2024 untuk memperbaiki akses, upaya pelebaran jalan belum sepenuhnya berhasil, yang berpotensi menyebabkan kemacetan saat libur. Selain itu, lahan parkir yang belum menggunakan paving mengakibatkan genangan air dan mengurangi efisiensi penggunaannya. Meskipun jalan sudah diaspal, kurangnya pelebaran dan perbaikan lahan parkir berdampak negatif pada kepuasan pengunjung.

c. Masalah manajemen dan koordinasi

Manajemen dan koordinasi di Pantai Pasir Putih Tasikharjo perlu ditingkatkan, karena implementasinya masih belum maksimal. Sebelum adanya tindakan tegas dari pengelola, beberapa pemilik warung menetapkan harga yang tidak wajar, seperti yang disampaikan oleh pengelola. Kritikan dari wisatawan mendorong pengelola untuk memperbaiki sistem penetapan harga, dengan contoh konkret adalah penetapan harga pecel menjadi Rp 12.000 untuk

meningkatkan kepuasan pengunjung dan keberlangsungan usaha. Miskomunikasi antara pengelola dan pedagang menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Melalui dialog dan masukan, pengelola kini lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan pedagang dan kenyamanan wisatawan. Upaya ini menunjukkan komitmen pengelola untuk mengoptimalkan manajemen wisata dan memastikan seluruh pedagang mengikuti pedoman harga yang sama. Dengan koordinasi yang lebih baik, keluhan terkait harga dan pelayanan dapat diminimalisir, menciptakan pengalaman wisata yang lebih positif, serta mendukung pertumbuhan potensi wisata dan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat.

3. Dampak Adanya Pemberdayaan Pada Masyarakat Desa Wisata Tasikharjo

Pemberdayaan masyarakat di desa wisata Tasikharjo memberikan dampak positif, mengarah pada perkembangan sumber daya manusia dan aspek lainnya. Analisis dampak pemberdayaan ini mengacu pada teori pembangunan berkelanjutan Otto Soemarwotto, yang menekankan peningkatan kondisi sosial, pelestarian budaya, pertumbuhan ekonomi, dan kesadaran lingkungan. Pemberdayaan masyarakat berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Dampak Ekonomi

a. Perubahan pada penghasilan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di desa wisata

Tasikharjo memberikan dampak signifikan pada bidang ekonomi, terutama dalam peningkatan penghasilan masyarakat. Sebelumnya, banyak ibu rumah tangga bekerja di rumah produksi ikan asin dan sebagai petani rajungan dengan pendapatan terbatas. Namun, dengan berkembangnya sektor pariwisata, mereka kini dapat berjualan di sekitar pantai, yang meningkatkan pendapatan mereka secara substansial. Para perantau yang sebelumnya merantau ke luar kota juga memilih untuk kembali dan bekerja di sektor pariwisata, menyadari bahwa penghasilan dari mengelola wisata pantai dapat mencapai UMR Kabupaten Rembang. Sebagai contoh, Khoirul Jovid, pengelola pantai, menyatakan bahwa banyak pekerja awal yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan minimal kini bisa mendapatkan lebih baik berkat perkembangan wisata ini, yang mencapai lebih dari UMR pada hari libur.

Meski peningkatan pendapatan sudah terlihat, masyarakat masih bergantung pada bantuan modal dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya reinvestasi pendapatan dari pariwisata untuk pengembangan fasilitas desa wisata. Banyak masyarakat yang menganggap pengembangan fasilitas adalah tanggung jawab pemerintah, tanpa merasa perlu berkontribusi secara finansial. Daryantik, seorang pelaku usaha mikro, mengungkapkan bahwa meskipun mereka membayar iuran untuk pajak, kontribusi untuk pengembangan fasilitas belum menjadi

prioritas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemandirian dalam pendanaan dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Desa Tasikharjo.

b. Terbukanya lapangan pekerjaan

Pemberdayaan masyarakat di desa wisata Tasikharjo telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, terlihat dari pergeseran profesi masyarakat dan kemampuan anak-anak sekolah untuk menghasilkan uang secara mandiri. Sebelum terlibat dalam pengelolaan wisata, mayoritas kepala keluarga di Desa Tasikharjo memiliki pekerjaan sebagai nelayan, petani garam, atau petani rajungan. Namun, setelah dibukanya pantai sebagai objek wisata, hampir 90% dari 110 kepala keluarga kini terlibat dalam pengelolaan wisata. Banyak di antara mereka yang bekerja sebagai petugas parkir atau petugas informasi, terutama lulusan SMA.

Keberadaan desa wisata tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha baru seperti warung dagang. Dampak positif ini terlihat dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang dari 4,83% pada tahun 2020 menjadi 2,60% pada tahun 2023. Selain itu, presentase penduduk miskin di kabupaten ini juga menurun sebesar 0,15% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor pariwisata, termasuk wisata pantai di Tasikharjo, dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja lokal dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Dampak Sosial

Pemberdayaan masyarakat di Desa Tasikharjo telah membawa dampak signifikan terhadap aspek sosial, terutama dalam hal perubahan struktural dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator perubahan tersebut adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan, yang terlihat dari banyaknya warung yang didirikan oleh ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya, sebagian besar perempuan di desa tersebut hanya membantu suami mereka yang bekerja sebagai nelayan. Namun, dengan adanya desa wisata, mereka kini memiliki kesempatan untuk membuka usaha sendiri, menjual makanan dan minuman di warung mereka. Daryantik, salah satu pemilik warung, menjelaskan bahwa penghasilan dari usahanya jauh lebih baik dibandingkan saat ia hanya membantu suami. Keuntungan yang diperoleh dari usaha warungnya tidak hanya meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memungkinkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata telah mengubah paradigma masyarakat terkait pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan.

Data yang diperoleh dari laporan kependudukan Desa Tasikharjo menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendidikan masyarakat antara tahun 2016 dan 2023. Jumlah lulusan SD dan sederajat meningkat secara drastis dari 112 menjadi 643, sedangkan lulusan SLTP menurun menjadi 319 dari 524. Meskipun terdapat penurunan di

tingkat pendidikan menengah, peningkatan paling mencolok terlihat di jenjang pendidikan tinggi, di mana pada tahun 2016 tidak ada warga yang melanjutkan pendidikan ke akademi atau perguruan tinggi, sementara pada tahun 2023 terdapat 25 orang lulusan Diploma I/II, 47 orang lulusan Diploma III, dan 14 orang yang telah menyelesaikan jenjang S1. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap pentingnya pendidikan serta kemampuan mereka dalam mengaksesnya. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Tasikharjo, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan desa wisata.

Dampak Lingkungan Hidup

Pembukaan desa wisata di Tasikharjo memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif, yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu tantangan utama adalah peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh pengunjung. Setiap pengunjung berkontribusi pada sampah yang dihasilkan, dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pencemaran di area pantai yang berpotensi merusak ekosistem. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah desa telah menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam mendirikan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi tentang cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Upaya lain yang dilakukan termasuk penyediaan tempat

sampah di berbagai lokasi wisata serta pemasangan plang bertuliskan “Jagalah Kebersihan” untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks pelestarian lingkungan, desa Tasikharjo juga melakukan penanaman mangrove dan cemara laut sebagai langkah proaktif untuk mencegah abrasi pantai dan melindungi habitat lokal.

Namun, meskipun terdapat berbagai upaya pengelolaan, tantangan yang dihadapi oleh desa wisata ini tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, kapasitas TPS3R menjadi isu yang krusial, dan ada kekhawatiran bahwa penumpukan sampah dapat melampaui kapasitas yang ada. Sutaji, Kepala Desa Tasikharjo, menekankan pentingnya adanya strategi yang jelas dalam pengelolaan sampah, terutama setelah kondisi sampah yang terpusat menumpuk. Ia mengungkapkan bahwa, meskipun telah ada upaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berbasis prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*, implementasi yang baik masih perlu diperhatikan. Selain itu, praktik pengelolaan yang saat ini dilakukan, seperti pembakaran sampah, menimbulkan risiko pencemaran udara yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan demikian, meskipun pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata di Desa Tasikharjo memberikan banyak manfaat dari sisi ekonomi dan sosial, tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan pelestarian ekosistem, harus segera ditangani agar keberlanjutan desa wisata dapat terjamin dan lingkungan tetap terjaga.

E. Simpulan

Keberadaan desa wisata di Tasikharjo adalah hasil nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh desa, seperti karang taruna, Pokdarwis, dan pemerintah desa. Mereka berhasil mengembangkan potensi wisata dengan merubah kondisi yang awalnya sederhana menjadi destinasi yang tertata dan menarik bagi wisatawan. Proses pemberdayaan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: pertama, *Enabling*, di mana masyarakat diberikan pelatihan untuk menyadari potensi wisata yang ada dan penyediaan fasilitas dasar untuk mendukung kegiatan pariwisata; kedua, *Empowerment*, yang mencakup sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dan Dinas Pariwisata untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata; dan ketiga, *Protecting*, yang bertujuan melindungi aset wisata dengan melakukan monitoring dan mencatat sarana prasarana yang ada, serta mengembangkan regulasi lokal untuk membatasi partisipasi pihak luar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. Meskipun upaya pemberdayaan ini menunjukkan kemajuan, dampaknya terhadap kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa wisata masih terhambat karena ketergantungan pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak swasta, yang mengakibatkan masyarakat hanya dapat menjalankan program yang telah ada tanpa kapasitas untuk melakukan pengembangan mandiri.

Faktor-faktor pendukung yang mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Tasikharjo termasuk dukungan kuat dari pemerintah desa,

partisipasi aktif masyarakat, dan potensi wisata yang unik, seperti keberadaan pantai berpasir putih dan hutan cemara yang menarik minat wisatawan. Dukungan ini tercermin dalam inisiatif pemerintah desa untuk mengirimkan proposal kepada pemerintah kabupaten guna mendapatkan pelatihan dan sosialisasi yang memberikan dampak positif dalam hal manajemen pariwisata dan kemandirian ekonomi masyarakat. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya finansial akibat pandemi Covid-19, masalah infrastruktur karena perluasan aksesibilitas yang memerlukan biaya tambahan, serta tantangan manajemen dan koordinasi yang dapat mengurangi daya tarik desa wisata, seperti keluhan wisatawan terkait harga yang tidak wajar. Dampak dari pemberdayaan ini tampak signifikan, terutama dalam perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani garam, nelayan, dan petani rajungan, kini beralih menjadi pedagang di tempat wisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Rembang, tetapi juga berdampak positif pada pendidikan, dengan semakin banyak individu yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, tantangan lingkungan tetap ada, khususnya dalam pengelolaan sampah yang masih dilakukan dengan cara dibakar, berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kualitas lingkungan hidup setempat.

F. Saran

Saran bagi pemerintah Desa Tasikharjo dalam mendorong pengembangan desa wisata

lebih lanjut mencakup peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa. Saat ini, ketergantungan masyarakat pada pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak luar menghambat inovasi mandiri. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengadakan program pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan agar masyarakat dapat mengelola potensi lokal secara kreatif dan independen. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga perlu diarahkan pada keberlanjutan, dengan fokus pada pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang efektif dan penggunaan energi terbarukan untuk menjaga kualitas lingkungan.

Perbaikan manajemen dan koordinasi juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan. Masalah terkait ketidakjelasan harga harus ditangani melalui pelatihan manajemen wisata yang terstruktur, termasuk pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas, seperti paket ekowisata atau wisata budaya, dapat memperkuat rasa memiliki terhadap desa wisata dan meningkatkan identitas Tasikharjo sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Rembang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo akan lebih berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kemandirian masyarakat, perekonomian lokal, dan kelestarian lingkungan.

G. Daftar Pustaka

Buku

- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2008). *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhlison, C. F. (2003). *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Totok Mardikanto, P. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Atmoko, T. P. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*, 148.
- Desiati, R. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. *DIKLUS*, 253-262.
- Hall, P. (2003). Cities in civilization: culture, innovation and urban order. *Journal of Irish Urban Studies*, 1-14.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 78-96.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 53-62.
- Made Heny Urmila Dewi, C. F. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Jatiluwih Tabanan, Bali. *KAWISTARA*, 117-226.
- Musaddun, W. K. (2013). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Pekalongan. *RUANG*, 261-270.
- Mustangin, D. K. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji Sosioglobal. *Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 59-72.
- Muhammad, E. M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata. *ketahanan social*, 23.

Jurnal

- Ade Jafar Sidiqd, R. R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 38-44.
- Anggit Kurnia Prihastha, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *JUMPA*, 221-240.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS:Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Kewarganegaraan*, 1 (2).
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *KAWISTARA*, 225-237.
- Rani Wahyuningsih, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.

Publika, 323-334.

- Risiant, N. S. (2015). Pengembangan Konsep Wisata Apung Kampung Nelayan Pesisir Balikpapan . *RUANG*, 31-40.
- Sugeng Santoso, G. A. (2021). Potensi Kampung Nelayan Gedongmulyo Untuk Dikembangkan Sebagai Desa Wisata Bahari Di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6385-6395.
- Sulistiyani AT. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta (ID): Gava Media.
- Tay, D. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik*, 217-222.
- Wiwin, I. W. (2019). Faktor Sukses dalam Pengembangan Wisata Pedesaan. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 25-29.
- Yusrisa Ekka Febriana, E. P. (2018). Analisis Dampak Pengembangan Kepariwisata Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi Dan Sosial Budaya Lokal Masyarakat (Studi pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 41-50.

ARTIKEL

Badan Pusat Statistik.2021."Kabupaten Rembang Dalam Angka", <https://drive.google.com/file/d/1TO2QnrbaybSoq3pbe8oeInMHMYWdq4O/view>, diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 21.00 WIB.

Rijanto, R. (2023, September 22). Kecamatan Kaliori Dalam Angka 2023. Retrieved from BPS Kabupaten Rembang: <https://rembangkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/a4825aae0360a10a7390e5db/kecamatan-kaliori-dalam-angka-2023.html>